

# KPK Siap Tangani Bansos

## Bantu Percepat Turun Izin Presiden

**PONTIANAK**—Kedatangan Ketua KPK Busro Muqaddas ke Pontianak memberikan angin segar dalam menangani pengu-

sutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) KONI Kalbar senilai Rp22,14 M. Karena hingga kini kasus yang ditangani Polda Kalbar belum mengalami kemajuan. KPK menurut Busro, siap memfasilitasi bila kendala penyidikan karena masalah izin presiden. Bahkan lembaga superbodi ini dapat mengambil alih penanganan kasus bansos.

“Bisa saja di take offer kasusnya. Kalau alasan penanganan terhambat masalah izin presiden mungkin perlu pressing dari kalangan masyarakat maupun NGO. Atau kalangan NGO bisa mengirim surat tembusan ke KPK. Kita siap membantu buat mempercepat turunnya izin Presiden,” katanya, Kamis (28/4) di Pontianak.

Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bansos Kalbar Polda Kalbar telah mengirim surat kepada Presiden melalui Mabes Polri untuk meminta keterangan dua orang saksi. Karena kedua saksi tersebut berstatus sebagai pejabat negara. Yakni anggota DPR-RI dapil Kalbar, Usman Jafar dan Zulfadhli.

Muqaddas mengatakan,

pihaknya tetap akan memantau perkembangan penyidikan kasus Bansos. Mengingat KPK sebagai supervise. Namun jika harus mengambil alih membutuhkan koordinasi. Tetapi, lanjut dia, kini koordinasi antar penegak hukum berjalan cukup baik. Antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

◆ Ke Halaman 7 Kolom 5

# KPK Siap Tangani Bansos

*Sambungan dari halaman 1*

Kembali, kata Muqaddah, KPK memungkinkan untuk men-take offer kasus Bansos. Jika penyidikan tidak mengalami kemajuan. Tetapi pengusutan yang telah dilakukan (Polda, red) tentunya menjadi langkah penting dalam menangani kasus tersebut. Serta mampu mengungkap secara tuntas.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar mengatakan penyidikan kasus dana Bansos terus berjalan. Mulai pengumpulan

barang bukti hingga selalu berkoordinasi menyangkut surat izin Presiden yang telah dikirim. Mukson menyangkal jika pengusutan dana bansos dinilai terhenti. Karena semua masih berlangsung. Sesuai prosedur hukum yang berlaku. Termasuk untuk pemeriksaan dua saksi. Buat memeriksa keduanya, kini masih sedang menunggu turun izin Presiden. "Kita selalu berkoordinasi. Kalau izin presiden sudah turun. Saksi pasti segera dipanggil," kata Mukson.

Mukson menambahkan, pihaknya juga sudah mengirim surat izin ke Gubernur. Buat memeriksa seorang saksi karena sedang menjabat sebagai anggota DPRD di salah satu kota di Kalbar. Surat izin tersebut kini belum terbit. "Kita masih menunggu," kata dia seraya menyatakan dalam waktu dekat akan meminta keterangan saksi ahli dari BPK.

Mencuatnya kasus Bansos bermula dari hasil audit regular oleh BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2009, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2009. Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI. Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan Dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah Rp 2,114 miliar. Total kerugian mencapai Rp22,14.

Penanganan kasus dugaan korupsi semula ditangani Poltabes Pontianak—kini Polresta. Kemudian penanganannya Polda yang mengambil alih. Sebelum kasus tersebut masuk ke KPK. Namun KPK kembali melimpahkan ke Polda Kalbar untuk mengusut kasus tersebut. Hingga kini baru satu tersangka yang ditetapkan dalam pengusutan kasus dana Bansos. Yakni mantan wakil Bendahara KONI Kalbar, Iswanto. Menurut Mukson, jumlah tersangka bisa saja bertambah. Namun masih membutuhkan bukti kuat. Termasuk keterangan saksi yang sedang menunggu izin Gubernur maupun Presiden.

(stm)